

# RENCANA KERJA 2021

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA



Direktorat Penegakan Hukum Pidana  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
NOMOR: SK.16/PHP/TU/REN.0/12/2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
19. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.6/PHPLH/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

20. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.15/PHP/TU/REN.0/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020-2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2021.**

Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021.

Kedua : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2020



Yazid Nurhuda, S.H., M.A

NIP. 19681209 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran  
Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana  
Nomor SK.16/PHP/TU/REN.0/12/2020  
tentang  
Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana  
Tahun 2021

## Daftar Isi

Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
Bab 2. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	4
1. Capaian Kinerja Tahun 2019	4
2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2020	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020	8
1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019	8
2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020	9
Bab 3. Rencana Kerja Tahun 2021	11
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	11
B. Program dan Kegiatan Tahun 2021	14
Bab 4. Penutup	17



## Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian kinerja Diirektorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2019 _____	4
Tabel 2. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2019 _____	5
Tabel 3. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2020 sebelum pandemi covid-19 _____	6
Tabel 4. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2020 setelah pandemic covid-19 _____	6
Tabel 5. Perubahan target kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 _____	7
Tabel 6. Prognosis capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 _____	7
Tabel 7. Capaian serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2019 _____	8
Tabel 8. Perubahan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 _____	9
Tabel 9. Prognosis serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2020 _____	9
Tabel 10. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2021 _____	14
Tabel 11. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2021 hasil redesain program, kegiatan, dan output kegiatan (keluaran) _____	15
Tabel 12. Kerangka pendanaan tahun 2021 _____	15
Tabel 14. Rincian anggaran berdasarkan sumber dana _____	16
Tabel 15. Rincian anggaran berdasarkan jenis belanja _____	16
Tabel 16. Anggaran belanja modal Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 _____	16

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana _____	3
Gambar 2. Sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana _____	3
Gambar 3. Perbandingan jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 tahun 2017-2019 _____	5
Gambar 4. Perbandingan kinerja anggaran penegakan hukum pidana tahun 2017-2019 _____	8
Gambar 5. Arah kebijakan pembangunan dalam Prioritas Nasional 6 _____	11
Gambar 6. Penjabaran program kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK _____	12
Gambar 7. Matriks hubungan Prioritas Nasional 6 dengan kegiatan penegakan hukum pidana LHK _____	13
Gambar 8. Sasaran dan output kegiatan penegakan hukum pidana LHK _____	13
Gambar 9. Indikator kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK _____	14

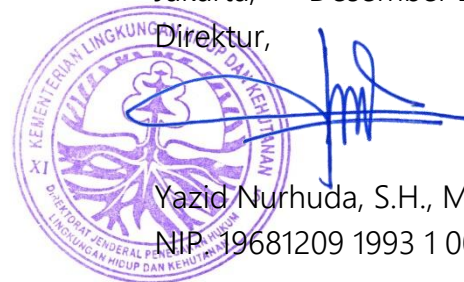
## Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, dan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Dokumen Renja yang merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk melaksanakan kegiatan terkait penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan adanya dokumen Renja ini diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan di Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan penggunaan anggaran tetap terarah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Jakarta, Desember 2020

Direktur,



Yazid Nurhuda, S.H., M.A

NIP. 19681209 1993 1 001

## Bab 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin konsumtif memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kebutuhan bahan baku mendorong eksploitasi sumber daya alam dan pembukaan lahan di kawasan hutan yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan.

Sejalan dengan amanat yang tercantum Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan menjamin hak setiap warganegara atas lingkungan hidup yang layak dijamin oleh Negara, Pemerintah menetapkan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terarah dan tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik.

### B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

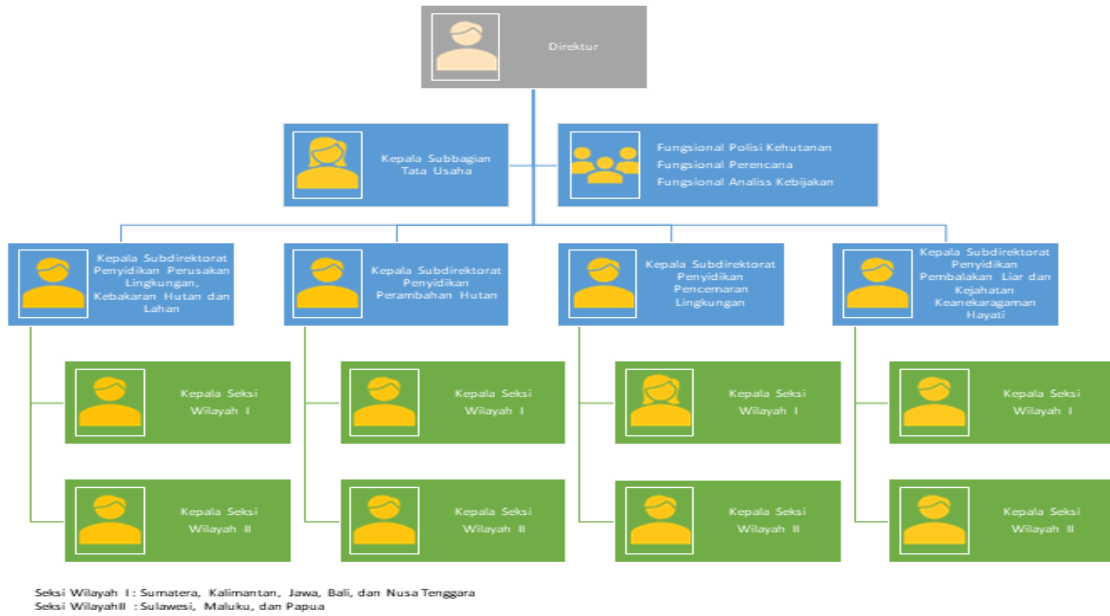
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti, serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana didukung oleh 50 orang pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak. Struktur organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar 2. Sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana

## Bab 2. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

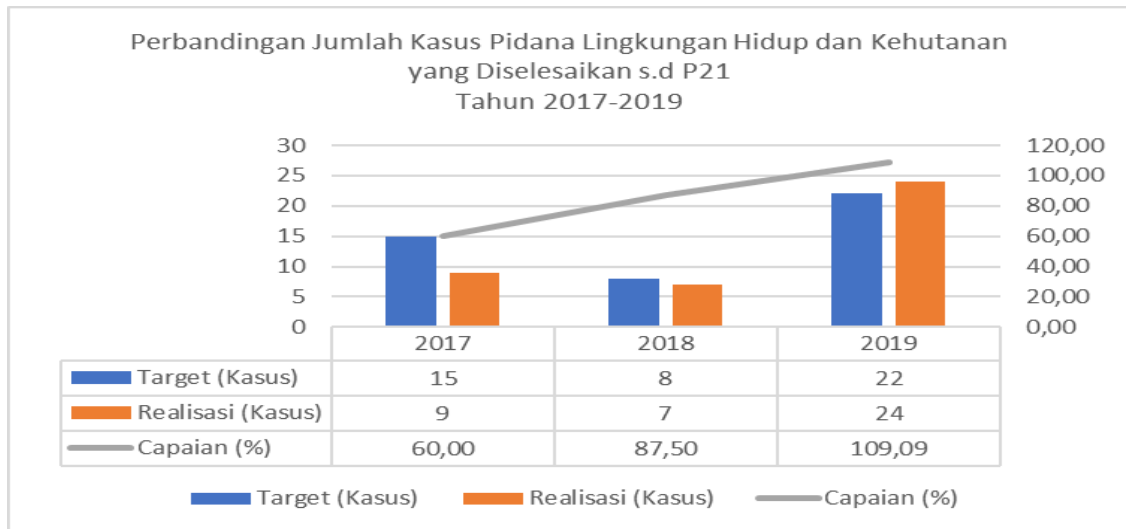
### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

#### 1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian kinerja Diirektorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100%
		Layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
2.	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	22 kasus	24 kasus	109%
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P-21	1 kasus	0	0
		Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 lokasi	1 lokasi	100%



Gambar 3. Perbandingan jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 tahun 2017-2019

Tabel 2. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2019

No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah
1.	Alat pelindung diri	Sepatu keselamatan ( <i>safety shoes</i> )	60 pasang
2.	Peralatan dan mesin	Laptop	6 unit
		Drone	4 unit
		Telepon genggam untuk pengendali drone	4 unit
		Bor auger	2 set
		Digital voice recorder	2 buah
		Mesin penghitung uang	1 unit
		AC portabel	4 unit
		Exhaust fan	2 unit
3.	Kendaraan	Mobil tahanan	6 unit
4.	Mebelair	Rak besi	4 unit
		Credensa	2 unit
		Lemari kaca	1 unit



## 2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2020

Dalam perjalanan tahun 2020, terjadi pandemi *corona virus disease 19 (covid-19)* yang menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran pandemi *covid-19* dan menanggulangi dampak pandemi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah penghematan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga. Penghematan anggaran tersebut berakibat pada penurunan jumlah target kinerja tahun 2020.

Tabel 3. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2020 sebelum pandemi covid-19

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal		
			Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	UPT Balai Gakkum (5 Balai)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	10 layanan	1 Layanan	5 layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	173 kasus	26 kasus	147 kasus
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	210 orang	190 orang	20 orang

Tabel 4. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2020 setelah pandemic covid-19

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Baru		
			Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	UPT Balai Gakkum (5 Balai)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	10 layanan	1 Layanan	5 layanan
2	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	130 kasus	10 kasus	120 kasus

perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	140 orang	130 orang	10 orang
--	---	-----------	-----------	----------

Tabel 5. Perubahan target kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Awal	Target Kinerja Baru
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 layanan
2.	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	26 kasus	10 kasus
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang	130 orang

Adapun prognosis capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada tahun 2020 berdasarkan pada target kinerja yang baru adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Prognosis capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Prognosis Realisasi	Prognosis Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
2.	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	10 kasus	10 kasus	100%
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	130 orang	130 orang	100%

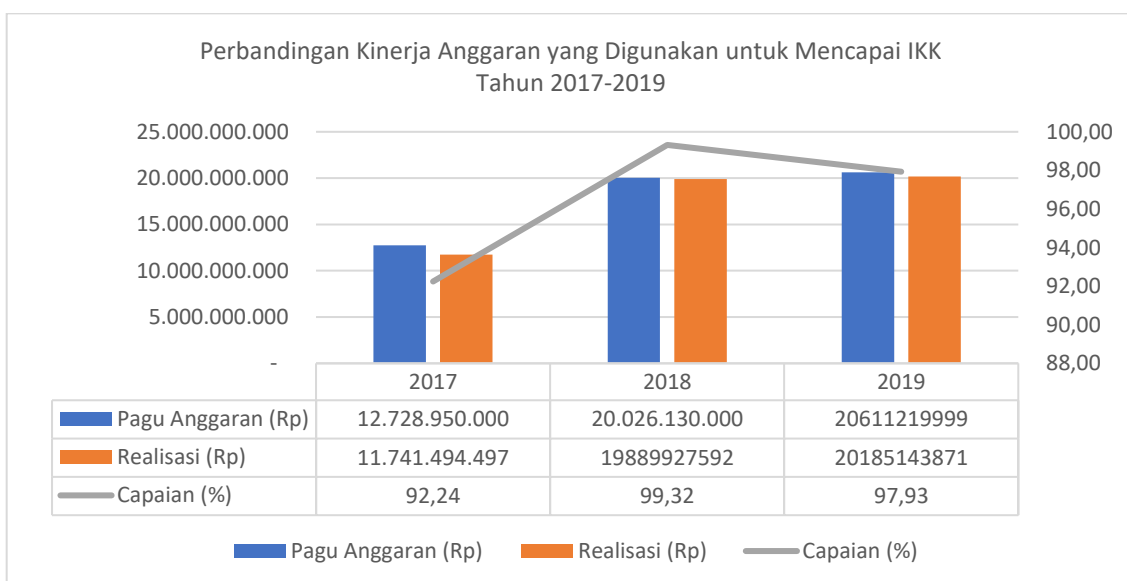
## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

### 1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019

Serapan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Capaian serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Layanan dukungan manajemen satker	375.000.000	331.605.700	88,43
2.	Layanan perkantoran	1.719.779.000	1.703.460.670	99,05
3.	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	15.211.219.000	15.050.791.171	98,95
4.	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	500.000.000	363.387.700	72,68
5.	Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum	5.250.000.000	4.870.965.000	99,41



Gambar 4. Perbandingan kinerja anggaran penegakan hukum pidana tahun 2017-2019

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2020

Penghematan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga dalam rangka penanggulangan pandemi *covid-19*, menyebabkan perubahan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020. Penghematan anggaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Perubahan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Baru (Rp)	Penghematan Anggaran (RP)
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1.161.379.000	1.161.379.000	-
2.	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	16.673.030.000	7.550.197.000	9.122.833.000
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	10.426.250.000	6.474.083.000	3.952.167.000
<b>Total</b>			<b>28.260.659.000</b>	<b>15.185.659.000</b>	<b>13.075.000.000</b>

Prognosis serapan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Prognosis serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2020

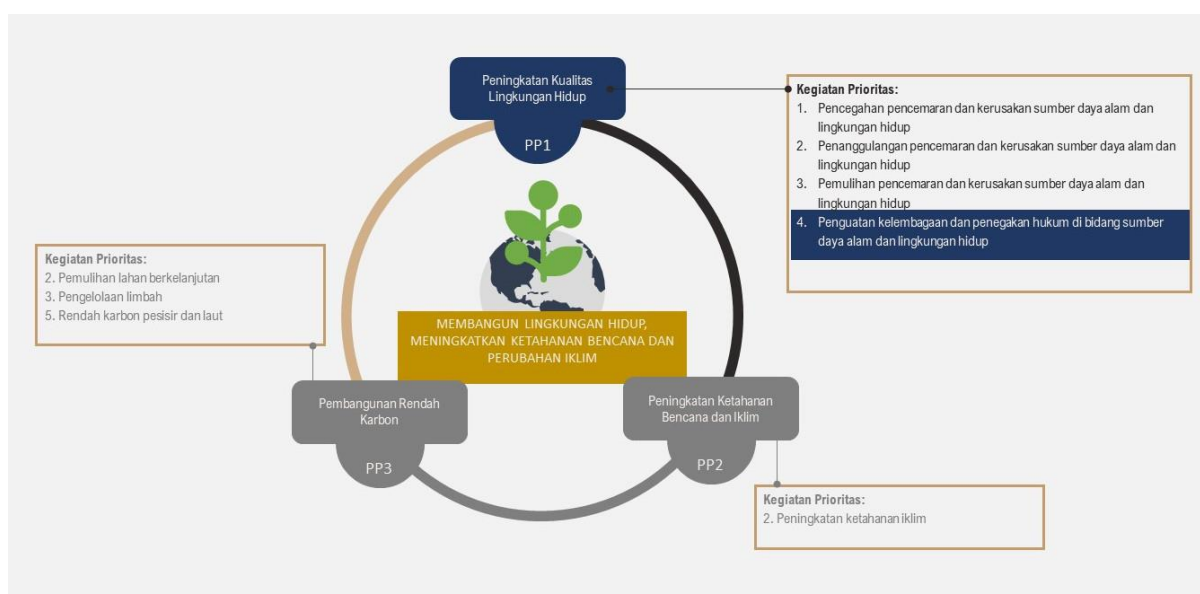
No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Prognosis Realisasi	Prognosis Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1.161.379.000	1.149.765.210	99%
2.	Meningkatnya Efektifitas	Kasus tindak pidana LHK yang	7.550.197.000	7.504.895.818	99,40%

	Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	diselesaikan sampai dengan P-21			
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	6.474.083.000	6.268.431.266	96,82%

## Bab 3. Rencana Kerja Tahun 2021

### A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional

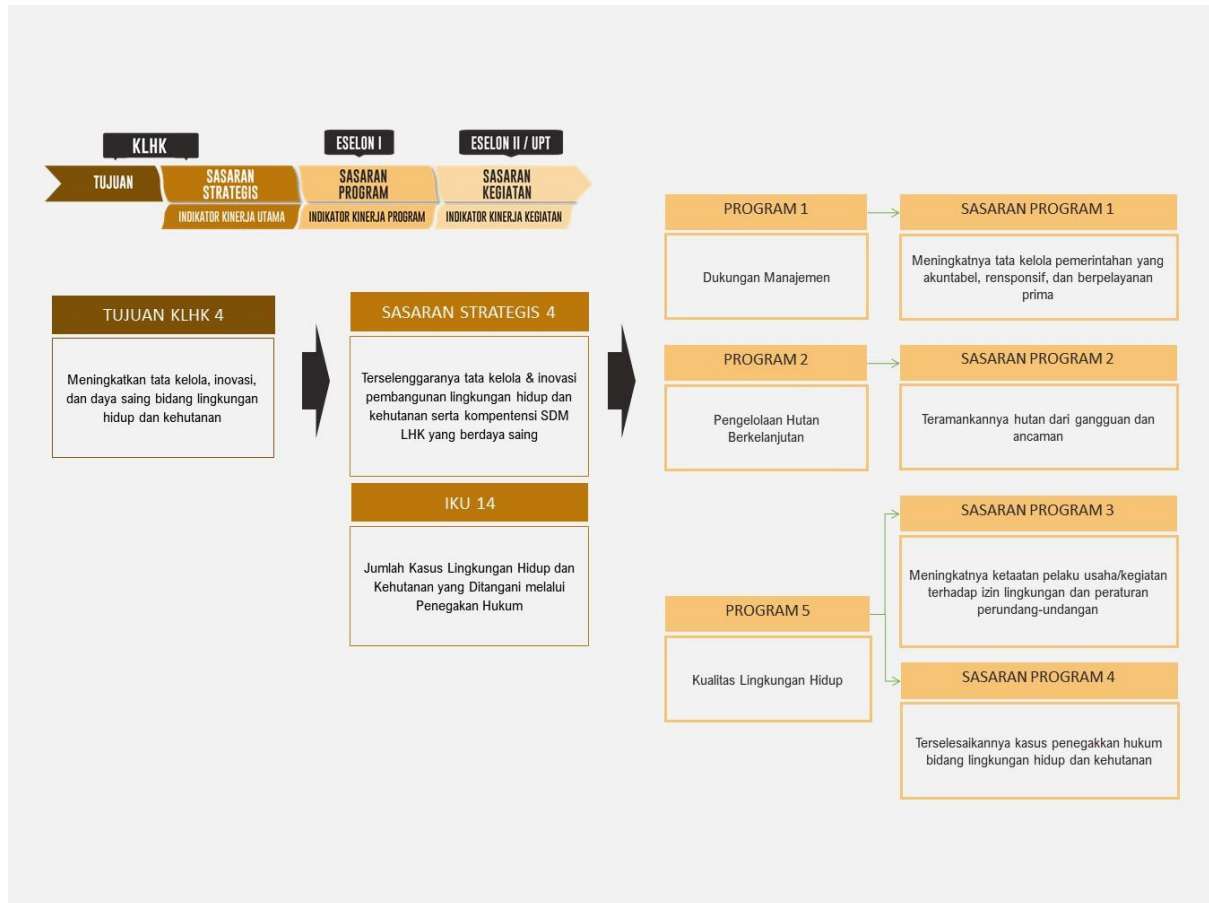
Dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional (PN) 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, Pemerintah menetapkan tiga Program Prioritas (PP) pembangunan, yaitu: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, (2) peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (3) penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon. Berdasarkan Program Prioritas tersebut, disusun Kegiatan Prioritas (KP) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkolaborasi antar kementerian/lembaga.



Gambar 5. Arah kebijakan pembangunan dalam Prioritas Nasional 6

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional di atas, Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh unit kerja yang ada di Kementerian LHK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dijabarkan program kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 6. Penjabaran program kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Sesuai dengan amanat undang-undang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK memberdayakan seluruh instrumen hukum yang ada, yaitu instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Penegakan Hukum Pidana berperan dalam menerapkan instrumen hukum pidana merupakan bagian dari tugas dan fungsinya.

RPJMN 2020-2024			
Prioritas Nasional 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
Program Prioritas 1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		
Kegiatan Prioritas 4	Penguatan kelembagan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup		
	Renstra Kementerian LHK 2020-2024		
	Sasaran Strategis 4	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	
	Program 1	Dukungan manajemen	
		Kegiatan 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK
	Program 3	Kualitas lingkungan hidup	
		Kegiatan 5	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan

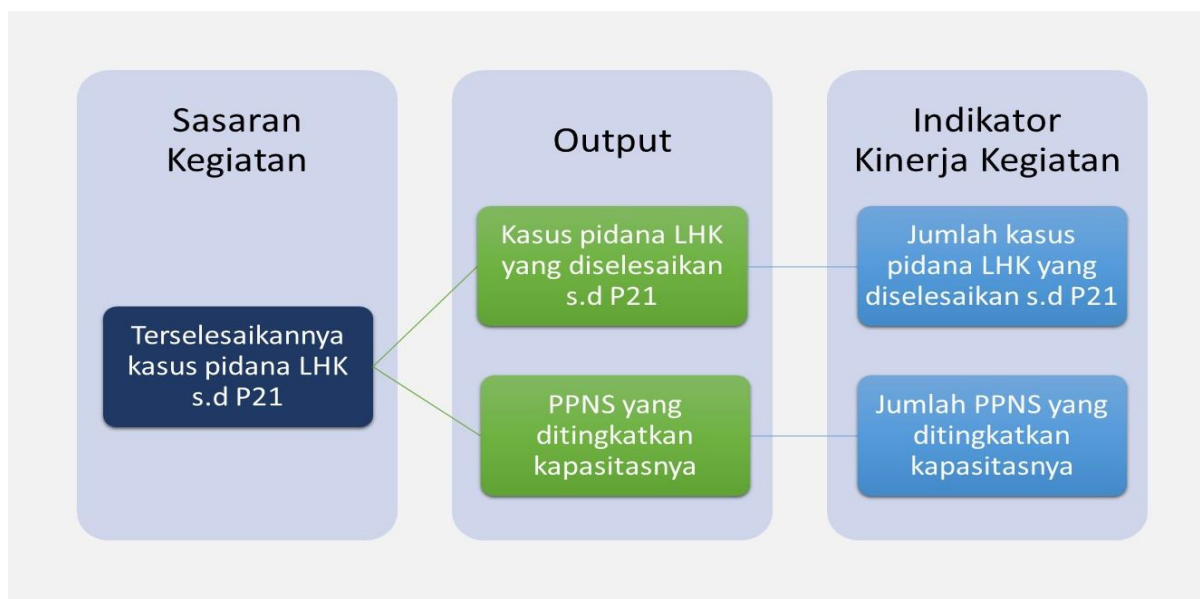
Gambar 7. Matriks hubungan Prioritas Nasional 6 dengan kegiatan penegakan hukum pidana LHK

Merujuk pada program kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, yaitu program kualitas lingkungan hidup, dijabarkan kegiatan, sasaran kegiatan, dan output kegiatan penegakan hukum pidana LHK sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 8. Sasaran dan output kegiatan penegakan hukum pidana LHK





Gambar 9. Indikator kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK

## B. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Target kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2021 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Target	
				Direktorat Penegakan Hukum Pidana	UPT Balai Gakkum
1.	Terselesaikannya kasus pidana LHK sampai dengan P21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	170 perkara	10 perkara	160 perkara
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	180 Orang	20 orang

Pada tahun 2020, disusun redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku efektif mulai tahun anggaran 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020; B-517/M.PPN/

D.8/PP.04.03/05/2020, tanggal 24 Juni 2020. Redesain tersebut mencakup redesign program, kegiatan, dan *output* kegiatan (keluaran). Hasil redesign terhadap kegiatan penegakan hukum pidana LHK tertuang dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 11. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2021 hasil redesign program, kegiatan, dan *output* kegiatan (keluaran)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
1.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 - Perseorangan	5 perkara
		Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 – Badan Usaha	5 perkara
2.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	-	180 orang

Berdasarkan hasil redesign program dan kegiatan, anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Kerangka pendanaan tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Pagu (Rp)
1.	Terselesainya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21	<i>Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21</i>		<i>10.111.379.000</i>
			Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 - Perseorangan	6,480,786,000
			Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 – Badan Usaha	3,630,593,000
			<i>PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	<i>7,352,371,000</i>
			<b>Total</b>	<b>17.463.750.000</b>

Tabel 13. Rincian anggaran berdasarkan sumber dana

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rupiah Murni (Rp)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)	Total (Rp)
1.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	6.760.474.000	3.350.905.000	10.111.379.000
2.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5.634.371.000	1.718.000.000	7.352.371.000
<b>Total</b>		<b>12.394.845.000</b>	<b>5.068.905.000</b>	<b>17.463.750.000</b>

Tabel 14. Rincian anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal Pajak (Rp)	Total (Rp)
1.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	10.111.379.000	-	10.111.379.000
2.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	6.703.100.000	649.271.000	7.352.371.000
<b>Total</b>		<b>16.814.479.000</b>	<b>649.271.000</b>	<b>17.463.750.000</b>

Untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pidana, Direktorat Penegakan Hukum Pidana berencana untuk melakukan pengadaan sarana prasarana yang termasuk dalam kategori belanja modal sebagai berikut.

Tabel 15. Anggaran belanja modal Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020

No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah	Pagu (Rp)
1.	Bangunan	Renovasi tempat penyimpanan barang bukti	1 paket	200.000.000
2.	Alat Pengumpul dan Pengolah Data	Lemari pendingin/ penyimpanan barang bukti	1 unit	300.000.000
		Laptop	4 unit	128.000.000
		Handy talkie	4 unit	21,271,000
<b>Total</b>				<b>649.271.000</b>

## Bab 4. Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana sekaligus menjadi acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian target prioritas pembangunan nasional.





Direktorat Penegakan Hukum Pidana  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan